

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Orde baru menyisakan beragam peninggalan dari pemerintahannya. Salah satu diantaranya adalah di bidang komunikasi massa. Saat itu pemerintahan orde baru dianggap masih konservatif. Terutama dalam masalah kebijakan terhadap pers. Ruang gerak pers sangat dibatasi dalam berbagai bentuk atau sarana.

Salah satu contoh nyata kebijakan ini adalah dengan dikeluarkannya lembaga perizinan yang bernama Surat Izin Usaha Lembaga, lisensi ini juga memakan korban yang puncaknya ditandai dengan pembredelan majalah *Tempo*, majalah *Editor*, Tabloid *Detik* pada tahun 1994. Tak heran pada masa itu banyak perusahaan-perusahaan pers yang gulung tikar. Dominasi sensor kekuasaan ini juga dipegang melalui Departemen Penerangan dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).

Era reformasi segala sesuatunya mulai berubah. Alam reformasi yang ditandai dengan krisis multidimensi ini ternyata menjadi penanda dibukanya iklim demokratis di Indonesia. Undang-undang No 40 Tahun 1999 tentang Pers membuat kebijakan Pers lebih otonom. Hal ini membuat semakin banyak munculnya perusahaan-perusahaan Pers baru di Indonesia.

Undang-undang No 40 Tahun 1999 telah mengategorikan 2 macam Pers. Yaitu Pers asing dan Pers Nasional. Pers asing adalah Pers yang

diselenggarakan oleh perusahaan asing. Sedangkan Pers nasional adalah Pers yang diselenggarakan oleh Pers Indonesia. Pembahasan selanjutnya mengacu pada Pers nasional yang hanya ditulis dengan kata Pers saja.

Fungsi Pers itu sendiri adalah sebagai penyedia informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol sosial. Pers juga mempunyai fungsi sebagai lembaga ekonomi. Dalam melakukan fungsinya, Pers tak lepas dari berbagai elemen pendukungnya. Salah satu ujung tombak dari kerja ini adalah wartawan.

Profesi wartawan dimulai dari kegiatannya pagi-pagi memikirkan apa yang harus “dikejanya”. Seribu satu macam kejadian dapat dilaporkan kepada pembaca: dari mulai keluarga keracunan singkong yang mungkin ada hubungannya dengan kegoncangan sistem moneter liberalisme, sampai kepada percobaan bunuh diri seorang pemuda harapan di streambath.¹

Pekerjaan sehari-hari seorang wartawan menunjukkan ciri-ciri dan kebiasaan yang berbeda dengan apa yang disebut “pekerjaan”. Umumnya ia tidak terikat oleh waktu tertentu. Sepanjang 24 jam ia dianggap bekerja aktif. Walaupun hanya selama 7 sampai 8 jam berhasil. Hal ini tergantung pada sifat pemberitaan yang dikejar, tergantung dari tempat ataupun keadaan.²

Tak jarang dalam melaksanakan tugasnya seorang wartawan tak lepas dari berbagai bentuk resiko. Misalnya saja dalam melakukan liputan di daerah konflik atau di daerah bencana. Bila tak waspada dan selalu berhati-hati, bisa-bisa para wartawan ini justru terkena celaka.

¹ Christianto Wibisono, 1977, *Pengetahuan Dasar Bagi Wartawan Indonesia*, Dewan Pers, Jakarta hal 48

² ibid

Seperti yang terjadi pada rombongan peliput dari RCTI. Mereka adalah Ersas Siregar (wartawan), Ferry Santoro (kameramen) RCTI, Ratmasyah (supir mobil) ditangkap anggota GAM di salah satu wilayah di Kabupaten Aceh Timur. Rombongan tersebut ditangkap dan kemudian disandera selama berbulan-bulan ketika melakukan kerja jurnalistik di Aceh.

Drama penyanderaan ini berakhir ketika Ersas ditemukan meninggal setelah terjadi kontak senjata antara pasukan TNI dan GAM di Simpang Ulim, Aceh Timur, 30 Desember 2003. Setelah sempat dibawa ke Rumah Sakit Korem Lilawangsa, di Lhokseumawe, Aceh Utara.³

Penyanderaan juga terjadi pada wartawan Metro TV Indonesia Meutya Hafid dan Budianto. Mereka diculik sebuah kelompok yang menamakan diri Faksi Tentara Mujahidin Irak. Hal ini diketahui dari video yang diterima jaringan televisi APTN di Baghdad, (18 Pebruari 2005). Video itu memperlihatkan gambar Meutya Hafid dan Budianto yang menunjukkan identitas mereka, sambil dikepung sejumlah orang bersenjata.

Melalui video itu, para penyandera menuntut Pemerintah Indonesia menjelaskan peran dan alasan kehadiran dua wartawan itu di Irak. Dalam pesan berbahasa Arab itu, para penculik juga menyatakan tidak bertanggung jawab atas keselamatan kedua sandera tersebut, dan mengancam akan membunuh keduanya.⁴

Contoh-contoh itu menggambarkan resiko yang harus di jalani oleh seorang wartawan ketika menjalankan profesinya. Tidak hanya itu setelah

³ www.tempointeraktif.com, Ersas Siregar Disemayamkan di TPU Astana Raga Tangerang

⁴ www.tempointeraktif.com , AJI Tuntut Pembebasan Dua Wartawan Metro TV

dibebani tugas untuk memberikan informasi seorang wartawan juga harus bekerja secara nonstop, bekerja lembur, terjaga hingga larut malam demi mendapatkan berita yang aktual.

Uraian tersebut menggambarkan bahwa profesi sebagai wartawan membutuhkan tenaga ekstra. Terlihat dari jam kerja yang dilaksanakan secara terus menerus dan tidak pasti. Ritme kerja semacam ini berakibat menyita waktu istirahat dan seringkali membuat para wartawan kurang memprioritaskan kondisi fisiknya.

Setiap profesi memang mengandung resiko. Namun mengingat profesi wartawan yang krusial maka seorang wartawan layak untuk mendapatkan perlindungan hukum sebagai bagian dari hak seorang pekerja. Beberapa perlindungan hak yang penting dari seorang pekerja adalah mengenai jam kerja, upah serta jaminan sosial tenaga kerja.

Jam kerja menjadi bagian hal yang perlu di perhatikan mengingat dalam melakukan kerjanya, baik itu wartawan yang bekerja di surat kabar, majalah, radio, televisi maupun yang diinternet mereka beroperasi 365 hari setahun dan 24 jam sehari. Seseorang tidak berhenti menjadi wartawan setelah pukul 5 sore seperti layaknya orang bekerja di kantor.

Hal ini juga dipertegas dengan dikeluarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomer KEP-233/MEN/2003 Tentang jenis dan sifat pekerjaan yang dijalankan secara terus-menerus. Di pasal 2 disebutkan bahwa:

“Pengusaha dapat mempekerjakan pekerja/ buruh pada hari libur untuk pekerjaan yang menurut jenis dan sifatnya harus dilaksanakan dan dijalankan secara terus-menerus”

Selanjutnya dalam pasal 3 disebutkan pekerjaan yang dimaksud dalam pasal 2

(1) adalah:

1. Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 yakni:
 - a. pekerjaan di bidang pelayanan jasa kesehatan
 - b. pekerjaan di bidang pelayanan jasa transportasi
 - c. pekerjaan di bidang jasa perbaikan alat transporatsi
 - d. pekerjaan di bidang usaha pariwisata
 - e. pekerjaan di bidang jasa pos dan telekomunikasi
 - f. pekerjaan di bidang penyediaan tenaga listrik, jaringan pelayanan air bersih (PAM) dan penyediaan bahan baker minyak dan gas bumi.
 - g. pekerjaan di usaha swalayan, pusat perbelanjaan dan sejenisnya
 - h. pekerjaan di bidang media masa
 - i. pekerjaan di bidang pengamanan
 - j. pekerjaan-pekerjaan yang apabila dihentikan akan mengganggu proses produksi, merusak bahan dan termasuk pemeliharaan/ perbaikan alat produksi.

Selain itu, kekurangan uang adalah rintangan utama yang harus dihadapi sebagian besar wartawan. Seringkali gaji wartawan tidak cukup untuk membiayai diri mereka sendiri dan keluarga. Wartawan ini kemudian melakukan kerja sambilan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Hasil penelitian terakhir Aliansi Jurnalis Independen (AJI) tentang kesejahteraan wartawan menuntut perhatian masyarakat terhadap profesi ini. Penelitian di 17 kota pada akhir 2005, yang melibatkan responden 400

wartawan dari 80 media massa itu mengungkap upah rata-rata wartawan antara Rp 900 ribu dan Rp 1,4 juta per bulan. Menyedihkan lagi masih dijumpainya wartawan yang gajinya di bawah Rp 200 ribu per bulan.

Upah mempunyai peran penting dalam suatu hubungan kerja. Motivasi pekerja/ buruh dalam bekerja adalah mencapai peningkatan kesejahteraan yang salah satu pilar utamanya adalah upah. Maka dari itu upah merupakan hak yang sangat mendasar bagi pekerja/ buruh. Oleh karena itu harus mendapatkan perlindungan secara memadai dari Pemerintah.

Perlindungan terhadap upah saja ternyata tidak cukup. Saat ini peran pekerja dalam pembangunan nasional di berbagai sektor semakin meningkat. Namun kemampuan kerja dan penghasilan tersebut senantiasa menghadapi resiko karena sakit, kecelakaan, cacat, hari tua, meninggal dunia, dan PHK.

Profesi wartawan tergolong mengandung resiko tidak kecil atas musibah atau kecelakaan kerja yang mungkin dialami. Mereka mempunyai jam kerja dan area kerja tidak terbatas, sehingga perlu diberikan suatu bentuk jaminan keamanan (social security) berupa jaminan sosial tenaga kerja sebagai kompensasi dari tugas-tugasnya.

Jika jaminan ini dapat menanggulangi resiko-resiko kerja maka akan menciptakan ketenangan kerja yang pada akhirnya akan membantu meningkatkan produktivitas kerja.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut: "Bagaimana perlindungan hukum bagi Pewarta yang bekerja kantor berita Antara Biro Yogyakarta terutama dalam hal jam kerja, upah dan jamsosteknya ? "

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Obyektif

Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap jam kerja, upah dan jamsostek Pewarta yang bekerja di Lembaga Kantor Berita Nasional ANTARA Biro Yogyakarta

2. Tujuan Subyektif

Untuk memperoleh data guna menyusun penulisan hukum sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

D. Manfaat Penelitian

1. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum di bidang ketenagakerjaan pada umumnya dan khususnya perlindungan hukum atas jam kerja, upah dan jaminan sosial terhadap wartawan.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi instansi pemerintah, perusahaan dan masyarakat pada umumnya. Selain itu juga dapat

dijadikan pembandingan antara teori yang didapat di bangku perkuliahaan dengan pelaksanaan sesungguhnya di dalam praktek. Khususnya di dalam perlindungan hukum terhadap jam kerja, upah dan jaminan sosial wartawan.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum/ skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis. Menurut Penulis, judul, rumusan masalah mengenai perlindungan hukum terhadap jam kerja, upah dan jaminan sosial wartawan belum ada yang meneliti. Namun apabila dikemudian hari ditemukan hal yang sama tanpa mengurangi rasa hormat penulis dengan peneliti sebelumnya, maka penulisan ini bisa memperkaya hasil penelitian sebelumnya.

F. Batasan Konsep

Agar pembahasan dalam penulisan ini menjadi fokus, maka penulis membatasi penulisan hukum ini pada perlindungan kerja terhadap jam kerja, upah dan jaminan sosial wartawan di Lembaga Kantor Berita Nasional Antara Yogyakarta.

Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik.⁵

⁵ Undang-undang no 40 th 1999 tentang Pers

Jurnalis adalah karyawan LKBN *Antara* yang menjalankan profesi jurnalistik yaitu mencari, menulis, mengolah serta menyajikan karya jurnalistik yang menjadi produk LKBN *Antara*.⁶

Pewarta adalah Jurnalis yang bertugas pokok mencari, menulis dan membuat berita.⁷

Jurnalistik adalah segala bentuk kegiatan yang dilakukan dan sarana yang digunakan dalam mencari, memproses dan menyusun berita dan ulasan mengenai berita hingga mencapai publik atau kelompok tertentu yang menaruh perhatian khusus pada hal-hal tertentu.⁸

Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia.⁹

Perusahaan Pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha Pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik dan kantor berita serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan atau menyalurkan informasi.¹⁰

⁶ keputusan Pemimpin Umum LKBN Antara Nomor:SKEP-012/PAP/I/2006, pasal 1

⁷ keputusan Pemimpin Umum LKBN Antara Nomor:SKEP-012/PAP/I/2006, pasal 2

⁸ Ana Nadhya Abrar, 2005, *penulisan berita*, universitas atma jaya yogyakarta, 2005, Yogyakarta

⁹ Undang-undang, op.cit., hal 3

¹⁰ Undang-undang, loc.cit., hal 3

Jam kerja adalah waktu dimana pekerja/ buruh wajib melakukan pekerjaan sesuai dengan perjanjian.¹¹

Upah adalah hak pekerja/ buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/ buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/ buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan /atau jasa yang telah atau akan dilakukan.¹²

Jaminan sosial tenaga kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia.¹³

G. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam rangka memperoleh data dilakukan dengan cara:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris.

Yaitu penelitian yang memfokuskan pada perilaku masyarakat hukum

¹¹ Abdul Khakim, 2006, *Aspek Hukum Pengupahan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 27

¹² Undang-undang no 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 1

¹³ Lalu Husni, 2008, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 148

(*Law in action*). Penelitian ini memerlukan data primer serta data sekunder untuk mendukung penelitian.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dari responden dan narasumber tentang obyek yang diteliti

b. Data Sekunder

Yaitu sumber data yang berupa semua bahan mengenai hukum yang memiliki kekuatan mengikat kedalam, dan terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap jam kerja, upah dan jaminan sosial, yaitu

- a. Undang- Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 40 tahun 1999 tentang Pers
- d. Undang-Undang Republik Indonesia No 3 tahun 1992 tentang Jamsostek
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 83 tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomer 14 tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomer 79 tahun 1998

- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 40 tahun 2007 Tentang Perusahaan Umum (PERUM) Lembaga Kantor Berita Nasional Antara Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia
- g. Peraturan Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi No. 02/MEN/1976, tentang Peraturan Perusahaan
- h. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Imigrasi Republik Indonesia Nomer KEP-233/MEN/2003 tentang jenis dan sifat pekerjaan yang dijalankan terus-menerus
- i. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomer KEP-102/MEN/VI/2004 tentang waktu kerja lembur
- j. Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja No. 07/MEN/ 1990 tentang pengelompokan Komponen Upah dan Pendapatan Non Upah
- k. Keputusan Pimpinan Umum Lembaga Kantor Berita Nasional Antara Nomor: SKEP-50/PAP/VI/2001 Tentang Peraturan Lembaga Kantor Berita Nasional Antara
- l. Keputusan Pimpinan Umum Lembaga Kantor Berita Nasional Antara Nomor: SKEP-021/PAP/I/ 2006 Tentang Jabatan Profesi Jurnalis LKBN Antara
- m. SK Pimpinan Umum LKBN Antara Nomer: SKEP-012/PAP/I/2006 Tentang Angka Kredit Bagi Jabatan Profesi Jurnalis LKBN Antara

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan obyek yang sedang diteliti. Meliputi : Buku, artikel, makalah yang berkaitan dengan ketenagakerjaan.

3) Bahan hukum tersier

Bahan- bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang diperoleh melalui Kamus Bahasa Indonesia.

3. Metode pengumpulan data

a. Wawancara

Yaitu mengumpulkan data dengan cara mendatangi lokasi yang akan dijadikan obyek penelitian. Cara yang digunakan adalah dengan melakukan tanya jawab secara lisan dengan responden

b. Studi Pustaka

Yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap jam kerja, upah dan jaminan sosial wartawan.

4. Lokasi penelitian

Sesuai dengan judul penulisan hukum ini, penelitian akan dilaksanakan di Lembaga Kantor Berita Nasional ANTARA Biro Yogyakarta.

5. Populasi dan Metode pengambilan Sampel

Populasi adalah keseluruhan obyek yang menjadi pengamatan peneliti, yaitu wartawan. Sedangkan sampel adalah sebagian atau contoh dari populasi. Sampel akan didapatkan dengan menggunakan metode Sampling Random Acak, dimana setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi Responden dalam penelitian ini.

6. Responden

Adalah subyek yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti dalam wawancara ataupun kusioner yang berkaitan langsung dengan obyek penelitian di Lembaga Kantor Berita Nasional ANTARA Biro Yogyakarta. Yaitu: 3 Wartawan yang bekerja di Lembaga Kantor Berita Nasional ANTARA biro Yogyakarta

7. Narasumber

Narasumber adalah subyek yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti yang berupa permasalahan yang sedang diteliti, yaitu Ketua Aliansi Jurnalistik Independen (AJI), Kepala Biro Kantor Berita ANTARA Biro Yogyakarta

8. Metode Analisis

Data yang diperoleh dalam penelitian hukum empiris kemudian diolah menggunakan analisis kualitatif. Maksudnya adalah analisis data berdasarkan apa yang diperoleh dari studi kepustakaan maupun penelitian empiris. Baik secara lisan maupun tertulis.

Metode yang digunakan adalah metode berpikir induktif, yaitu metode berpikir yang berawal dari proposisi-proposisi khusus yang berakhir pada suatu kesimpulan berupa asas umum.

Hasil penelitian dari studi pustaka dan penelitian empiris disusun secara sistematis sehingga saling melengkapi kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap jam kerja, upah dan jaminan sosial tenaga kerja wartawan.

H. Sistematika Penulisan

- Bab I : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.
- Bab II : Menguraikan tentang tinjauan umum Perjanjian kerja, Tinjauan umum Jenis dan sifat pekerjaan yang dijalankan terus menerus dan Peraturan perusahaan, Tinjauan umum jam kerja dan upah, tinjauan umum jamsostek, Tinjauan umum Lembaga Kantor Berita Nasional ANTARA Biro Yogyakarta dan tinjauan umum wartawan, Selain itu juga menguraikan mengenai analisis berkaitan dengan upaya hukum terhadap jam kerja, upah dan jamsostek yang di gunakan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap wartawan.
- Bab III : Berisi kesimpulan dan saran terhadap hasil penelitian.